

BAB IV

AKTIFITAS SARIKAT ISLAM DALAM PERGERAKAN NASIONAL DI INDONESIA

A. Faktor-faktor Pendorong Keikut-sertaan Sarikat Islam dalam Pergerakan Nasional

Sarikat Islam pada masa awal keberadaannya di permulaan abad ini, belum secara nyata melaksanakan kegiatan di bidang politik, yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa dan negara Indonesia. Hal itu disebabkan oleh adanya larangan berpolitik bagi rakyat Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Sarikat Islam adalah di bidang sosial, ekonomi dan keagamaan, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama Islam. Keikut-sertaan Sarikat Islam di dalam pergerakan nasional, yang diwujudkan dengan aktifitasnya di bidang politik, adalah didorong oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Adanya pengaruh Renaissance Islam yang masuk di Indonesia.
2. Dilaksanakannya Undang-undang Desentralisasi, dengan pemberian otonomi pemerintahan di beberapa daerah serta pengembangannya.
3. Banyaknya dukungan rakyat Indonesia kepada organisasi Sarikat Islam, sehingga mendorongnya untuk memperjuangkan berbagai keluhan dan tuntutan mereka.
4. Pendorong secara langsung adalah lahirnya gagasan Indie Weerbaar (Aksi Ketahanan Indonesia) bagi rakyat Indonesia.

Pengaruh pemikiran Renaissance Islam, adalah sejak semula mendorong berdirinya Sarikat Islam yang kemudian dikembangkan olehnya di Indonesia. Pemikiran tersebut antara lain mempropagandakan modernisasi masyarakat Islam dan menyerukan supaya umat Islam di dunia melepaskan diri

dari penjajahan Barat dan eksploitasi Kapitalis Barat. Untuk itu masyarakat Islam harus mengubah cara berbuat dan berfikirnya yang kolot, serta mau mempelajari pengetahuan Barat.¹⁴² Pemikiran yang demikian itu banyak mempengaruhi para pemimpin Sarikat Islam, sehingga dalam upayanya untuk memperbaiki dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia, mempergunakan agama Islam dan ilmu pengetahuan Barat sebagai sarannya. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh para pemimpin Sarikat Islam; di dalam pidato-pidatonya menyatakan, bahwa agama Islam merupakan dasar bagi semua kemajuan, yakni orang dengan setia kepada Islam dan menjalankan ajarannya. Karena dengan Islam, mereka akan dapat mencernakan benih-benih demokrasi dalam dirinya, dan ajaran-ajarannya adalah mendorong untuk berbuat baik serta giat berusaha demi kesejahteraan sendiri dan sesamanya. Sedangkan pengetahuan Barat, diperlukan untuk memberikan alat-alat teknis untuk kemajuan tersebut. Adanya gabungan antara kedua unsur tersebut adalah sangat diperlukan untuk mencapai kemajuan bagi rakyat Indonesia.¹⁴³ Untuk mewujudkan hal itu adalah merupakan tugas Sarikat Islam. Dengan kegiatan bersifat reformistis tersebut, dimaksudkan pula untuk menghilangkan salah pengertian terhadap Islam, juga usaha untuk menolak politik keagamaan pemerintah kolonial terhadap Islam.

Faktor lain, adalah sejalan dengan dilaksanakannya politik Etis di Indonesia, diadakan perubahan dalam sistem pemerintahan ; yaitu dilaksanakannya Undang-undang Desentralisasi, yang memberikan kesempatan sekedarnya kepada rakyat Indonesia untuk turut-serta dalam pemerintahan

¹⁴² Abu Hanifah, Renungan, op. cit., p. 11.

¹⁴³ Di Indonesia waktu itu terdapat jurang yang dalam antara Islam dan pemikiran Barat moderen; yang satu terdapat mereka menggunakan seluruh waktunya untuk agama, seperti guru-guru agama atau para Kiyai, namun mereka ini umumnya fanatik dan konservatif. Di pihak lain terdapat kelompok cendekiawan Indonesia berpendidikan Barat, yang tidak begitu faham dengan soal agama, tetapi haus akan pengetahuan Islam yang sejati, yang tidak dapat diperoleh dari para Kiyai tersebut. A.P.E. Korver, op. cit., pp. 69, 70.

daerah.¹⁴⁴ Desentralisasi tersebut pada hakekatnya adalah mencakup tiga hal, yaitu :

1. Pendelegasian sebagian kekuasaan dari pusat pemerintahan di Hindia Belanda, dari pemerintahan ini ke departemen, pejabat lokal, dan dari pejabat Belanda ke pejabat pribumi.

2. Menciptakan lembaga-lembaga otonom yang mengatur urusan sendiri.

3. Pemisahan keuangan negeri dari keuangan pribadi.¹⁴⁵ Dengan undang-undang tersebut diciptakan dewan-dewan lokal; baik dewan Karesidenan maupun dewan Kota sebagai lembaga hukum yang mempunyai wewenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak, urusan bangunan-bangunan umum, seperti : jalan, taman, jembatan dan sebagainya. Pada tahun 1905 didirikan dewan kota di Batavia, Mr. Cornelis dan di Buitenzorg, setahun kemudian di beberapa tempat di Jawa dan di luar Jawa. Di antara bentuk pelaksanaan dan pemberian otonomi kepada Hindia Belanda, adalah persiapan mendirikan Dewan Rakyat. Pada tahun 1907 oleh Fock diusulkan perluasan Dewan Hindia, kemudian penggantinya; de Waal Malefijt pada th. 1913 mengusulkan pendirian suatu Dewan Kolonial.¹⁴⁶ Adanya Desentralisasi tersebut, orang Indonesia sudah diperbolehkan berpolitik, tetapi sangat terbatas sekali dan dalam lingkungan dewan-dewan kota. Politik umum yang mengenai tanah air seluruhnya masih dilarang. Sehubungan dengan itu Sarikat Islam merasa dapat ikut serta memikirkan lebih lanjut bagaimana undang-undang tersebut dapat secepat mungkin dan dengan sempurna dapat dilaksanakan, sehingga pada saatnya nanti untuk seluruh Indonesia dapat mencapai status pemerintahan sendiri.

¹⁴⁴A.K. Pringgodigdo, Sejarah, op. cit., p. xi.

¹⁴⁵Yusmar Basri(edit.), op. cit., p. 48.

¹⁴⁶Dewan tersebut direncanakan beranggotakan 29 orang, diantaranya anggota Dewan Hindia, 11 anggota yang dipilih oleh dewan lokal, sebagian mewakili kepentingan Belanda dan sebagian lain yang diangkat untuk membela kepentingan pribumi. Ibid., p. 51.

Di dalam hal banyaknya dukungan rakyat Indonesia terhadap Sarikat Islam, yang juga mendorong organisasi tersebut ikut serta dalam pergerakan nasional, adalah dapat dikemukakan bahwa Sarikat Islam yang sejak awal berdirinya ditujukan kepada rakyat Indonesia, ternyata memperoleh sambutan baik dari rakyat. Sehingga Sarikat Islam memperoleh keanggotaan yang besar jumlahnya dari berbagai lapisan masyarakat; dengan membawa berbagai masalah dan harapan yang ingin diperoleh penyelesaiannya dengan menjadi anggota organisasi tersebut. Di samping itu Sarikat Islam yang memilih identitas Islam sebagai basic perjuangannya, juga mampu menarik sebanyak mungkin orang Indonesia dari berbagai kepulauan di Indonesia. Sebab Islam bagi kebanyakan rakyat; sebagaimana dikatakan oleh Snouck Hurgronje, adalah merupakan milik mereka yang tiada terjamah dan yang terakhir mereka miliki setelah begitu banyak mereka dirampok oleh orang Belanda.¹⁴⁷ dan Islam sekaligus juga berfungsi sebagai titik pusat identitas bagi mereka untuk melambangkan keterpisahan dari dan perlawanannya terhadap penguasa-penguasa Kristen dan Asing. Banyaknya dukungan tersebut membawa Sarikat Islam untuk menduduki posisi politik yang utama; untuk mengemukakan berbagai keluhan yang ada di masyarakat serta mengajukan himbuan dan tuntutan kepada pemerintah, untuk menyelesaikan masalah yang ada ataupun memperbaiki kondisi yang ada. Di dalam hal ini Sarikat Islam ternyata harus berhadapan dengan sistim pemerintahan kolonial yang dianggap sebagai penyebab kemunduran dan kerusakan kehidupan rakyat Indonesia. Sementara itu keanggotaannya yang besar; meliputi seluruh lapisan masyarakat dan berasal dari berbagai kepulauan di Indonesia, menyebabkan bangkitnya kesadaran dan keberanian warganya,¹⁴⁸ dan sering terwujud dalam tin.

¹⁴⁷A.P.E. Korver, Sarekat, op. cit., p. 271.

¹⁴⁸W. Poespoprodjo, Jejak-jejak, op. cit., p. 51.

dakan-tindakan yang radikal serta terjadinya ledakan-ledakan permusuhan di dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dirasakan. Tindakan tersebut baik yang didobong oleh sebagian warganya yang bersifat milenaris,¹⁴⁹ maupun oleh watak golongan santri yang demokratis dan militan, yakni sangat siap untuk berjuang dan rela berkorban.

Faktor penting yang menumbuhkan aktifitas pergerakan nasional secara nyata oleh Sarikat Islam, adalah disebabkan oleh adanya persoalan pertahanan Indonesia (*Indie Weerbaar*). Hal itu timbul karena pecahnya perang Dunia yang dikhawatirkan melibatkan Indonesia ataupun Indonesia diserang oleh negara lain. Dikemukakan bahwa angkatan perang Hindia Belanda selalu terletak pada angkatan Laut. Angkatan Darat yang sebagian besar terdiri serdadu-serdadu bayaran adalah lebih ditujukan untuk menghadapi musuh dari dalam negeri daripada menahan musuh luar negeri; sedangkan waktu itu di Indonesia tidak terdapat kewajiban militer. Dengan bangkitnya Jepang sebagai negara moderen, orang menjadi khawatir terhadap cita-cita ekspansi Jepang di Asia, sementara itu Pers luar negeri; terutama Jepang, mengemukakan fakta dalam artikelnya bahwa angkatan perang Hindia Belanda keseluruhannya tidak mampu melawan agresor dari luar. Hal itu menimbulkan kegelisahan besar, baik di Negara Belanda maupun di Hindia Belanda. Sehubungan dengan hal itu di kalangan kolonial orang semakin peka akan kebutuhan perluasan tentara Hindia Belanda, dengan kemungkinan dibentuknya milisi Indonesia dan dilaksanakannya kewajiban milisi.¹⁵⁰ Selanjutnya atas inisiatif pengusaha Belanda yangkhawatir bahwa Perang Dunia

¹⁴⁹Milenaris dalam kehidupan rakyat Indonesia, ber sifat mesianis, yakni kepercayaan akan terciptanya suatu negara bahagia oleh seorang juru selamat adikodrati atau mesias, dikenal dengan Ratu Adil atau Imam Mahdi di kalangan umat Islam; dengan ajaran eskatologinya. Mereka memproyeksikannya kepada Sarikat Islam, khususnya pada kharisma pribadi Tjokroaminoto. A.P.E. Korver, *op.cit.*, pp. 74, 75.

¹⁵⁰*Ibid.*, p. 57.

akan menyebar ke Indonesia dan oleh sebab itu akan menghancurkan kedudukan dan kapital mereka, maka didirikan suatu panitia yang berusaha mencari dukungan rakyat banyak dalam tuntutanannya agar Hindia Belanda mengembangkan kemampuan pertahanannya. Untuk keperluan tersebut mereka mengajak kerjasama organisasi-organisasi rakyat Indonesia; termasuk Sarikat Islam.¹⁵¹ Dalam hal ini Sarikat Islam menyatakan keberatannya untuk melaksanakan milisi tanpa adanya janji-janji kongkrit dari pihak Belanda, untuk memberikan kemerdekaan politik yang lebih luas kepada Indonesia.¹⁵²

B. Sifat-sifat Perjuangan Sarikat Islam di dalam Pergerakan Nasional

Sebagaimana diketahui bahwa pergerakan nasional di Indonesia adalah merupakan reaksi bangsa Indonesia terhadap sistem pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Reaksi tersebut dilaksanakan dalam berbagai sifat maupun bentuk. Adapun sifat maupun bentuk daripada reaksi bangsa Indonesia tersebut, adalah dibentuk oleh sifat maupun bentuk penjajahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial, di samping kemampuan dan perhatian bangsa Indonesia dalam memberikan jawaban terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penjajahan itu.¹⁵³ Sifat penjajahan Belanda di Indonesia secara umum adalah dalam bentuk dominasi politik, eksploitasi ekonomi dan penetrasi kebudayaan. Secara khusus sebagaimana pendapat R. Kennedy antara lain adalah membeda-bedakan warna kulit, menjadikan tanah Indonesia sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara Belanda, perbaikan sosial sedikit dan jarak sosial yang jauh antara bangsa yang menjajah dengan yang dijajah.¹⁵⁴

¹⁵¹ Deliar Noer, Gerakan, op. cit., p. 132.

¹⁵² A.P.E. Korver, op. cit., p. 58.

¹⁵³ Suhartoyo Hardjosatoto, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia (Suatu Analisa Ilmiah) (Yogyakarta: Liberty, 1985), p. 87.

¹⁵⁴ C.S.T. Kansil dan Julianto, Sejarah Perjuangan, op. cit., pp. 19, 20.

Adanya penjajahan dengan segala bentuk dan sifatnya tersebut, menimbulkan kerusakan dalam segala segi kehidupan rakyat Indonesia.

Adanya sifat-sifat penjajahan dan segala kerusakan yang ditimbulkan tersebut, maka Sarikat Islam sebagai salah satu organisasi pergerakan nasional mempunyai berbagai sifat ataupun bentuk-bentuk usaha yang bermacam-macam dalam usahanya memerdekakan bangsa dan negara Indonesia, seperti dikemukakan bahwa ia mempunyai sifat nasionalis, demokratis, religius dan ekonomis, baik yang dilaksanakan dengan sikap kooperatif maupun dengan sikap non kooperatif; yang lazim dikenal di kalangan Sarikat Islam dengan sikap Hijrah.

Sarikat Islam dalam usahanya memerdekakan bangsa dan negara Indonesia; dalam kondisi kegiatan yang bersifat politik untuk mencapainya tidak mungkin dilaksanakan, karena adanya larangan pemerintah terhadap kegiatan politik. Maka Sarikat Islam mengarahkan aktifitasnya untuk meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia, yang karena penjajahan banyak mengalami kerusakan, seperti di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan serta kehidupan keagamaannya yang banyak mengalami hambatan. Sehingga dalam usahanya ini kegiatan yang dilaksanakan bersifat ekonomis, sosial dan keagamaan. Di samping sifat nasionalis yang terkandung dalam kegiatannya; yang untuk sementara waktu tidak dimunculkan dengan maksud menjaga kelangsungan kehidupan organisasi serta perjuangannya. Bahkan pemimpin Sarikat Islam menolak tuduhan bahwa organisasinya bersifat politik ataupun organisasinya yang menghendaki revolusi.¹⁵⁵

Kegiatan Sarikat Islam yang bersifat ekonomis, dilaksanakan sejalan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan politik etisnya, se-

¹⁵⁵Deliar Noer, op. cit., p. 125.

hingga dapat menghilangkan kesan bahwa Sarikat Islam bertindak sebagai partai politik. Melalui kegiatan bersifat ekonomis tersebut, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi rakyat serta memperjuangkan perbaikan-perbaikannya, baik melalui keluhan dan tuntutan kepada pemerintah maupun kegiatan praktisnya dalam perbaikan ekonomi; sehingga semangat rakyat untuk berusaha di bidang ekonomi dapat dihidupkan kembali serta dapat menyadari akan garga dirinya sebagai bangsa yang pernah jaya di masa lalu. Upayanya tersebut memperoleh simpati dan dukungan pemerintah kolonial, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghalangi usahanya, meskipun banyak tindakan politik yang dilaksanakan.

Dalam kegiatannya yang bersifat sosial, akan dapat ditanamkan kembali semangat kebersamaan dan persaudaraan, yang akan melahirkan rasa kesetia-kawanan serta keberanian untuk membela hak-haknya dan menolak segala perkataan ataupun perbuatan yang merendahkan martabatnya sebagai bangsa. Tumbuhnya semangat dan kesadaran rakyat tersebut, adalah sangat diperlukan bagi usaha dan kegiatan pergerakan nasional.

Sifat agamis perjuangan Sarikat Islam adalah melaksanakan fungsi dan keberadaan agama Islam bagi kebanyakan rakyat Indonesia, sehingga melalui sifat perjuangan ini, keterikatan dan kepatuhan rakyat Indonesia kepada agamanya dapat dikokohkan, yang sekaligus akan dapat dihasilkan peningkatan segi moral rakyat Indonesia; suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan perjuangan pergerakan nasional.¹⁵⁶ Kondisi seperti itu sebagai mana yang dilaporkan oleh penasehat bumiputera; G.A.J. Hazeu kepada Gubernur Jenderal :

¹⁵⁶Yaitu dengan adanya perpaduan antara sentimen agama dan semangat cinta tanahair, akan dapat meledakkan semangat juang mereka untuk melawan penjajahan Belanda. A.P.E. Korver, op. cit., p. 51.

Djuga agama Islam mendjadi faktor jang penting dalam pergerakan rakjat dimasa sekarang. Djelas sekali, bahwa ditahun-tahun jang achir ini ke-Islaman rakjat lebih menonjol. Dari berbagai-bagai pertanda dapat diambil kesimpulan, bahwa bukan bagian ketjil dari rakjat, tidak sadja lebih jakin kepada agama itu, mereka termasuk golongan jang besar, jang dapat memberi perlindungan terhadap matjam-matjam pengaruh, dan mem beri kekuatan kepada golongan itu.¹⁵⁷

Di samping itu, melalui perjuangan ini persatuan dan kesatuan bangsa dapat dirintis melalui ikatan keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia. Sebab agama Islam bukanlah merupakan suatu faktor yang negatif yang mengesampingkan minoritas, serta bukan sekedar agama nominal dari mayoritas rakyat Indonesia, tetapi Islam dapat menjembatani perbedaan-perbedaan etnis di Indonesia dan menjadi faktor Integrasi dalam masyarakat Indonesia serta memiliki muatan psikologis yang kuat; mempunyai daya tarik bagi sebagian besar rakyat Indonesia.¹⁵⁸ Sehingga perasaan nasionalisme dan cinta tanah air dapat ditumbuhkan dan disebar luaskan ke seluruh Indonesia.

Sifat-sifat perjuangan tersebut, adalah yang dapat dilaksanakan secara maksimal dalam suatu konstelasi politik waktu itu, di samping masih belum meratanya kesadaran nasional di kalangan kebanyakan rakyat Indonesia; dalam upayanya untuk melaksanakan perjuangan pergerakan nasional. Dengan bentuk dan sifat perjuangan Sarikat Islam tersebut, pada dasarnya ia telah melaksanakan suatu tujuan ketata-negaraan,¹⁵⁹ yaitu ia selalu memperjuangkan dengan gigih keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan lain lain keburukan dari fihak pemerintah kepada rakyat Indonesia. Hal yang demikian ini seperti diakui oleh Idenburg bahwa organisasi Sarikat Islam adalah merupakan gerakan rakyat, dan yang selanjutnya meramalkan :

¹⁵⁷ Mohammad Roem, Tiga Peristiwa, op. cit., p. 19.

¹⁵⁸ A.P.E. Korver, op. cit., p. 271.

¹⁵⁹ Yusmar Basri(edit.), Sejarah, op. cit., p. 187.

Gerakan Sarekat Islam terlebih dahulu akan menentang pemerintahan bangsa Bumiputera. Djika kesadarannya atas harga diri sendiri telah mendalam, maka djika ia tidak hendak menentang, sekurang-kurangnya mengambil kedudukan "disamping" pemerintah Bumiputera, jang memang sangat mentjurigai Sarekat Islam. Dan djika berontak atau mogok, lambat laun akan menentang pula pemerintah bangsa Eropa, bukan karena ia ditangan orang Eropa (Belanda) melainkan semata-mata oleh karena ia adalah pemerintahan.¹⁶⁰

Kecurigaan pemerintah kolonial tersebut bukannya tidak terbukti, karena di dalam perkembangan berikutnya, sifat politik perjuangan Sarikat Islam terlihat menjadi kuat; setelah keanggotaannya mencapai jumlah yang amat besar, kegiatannya telah dapat membangkitkan dan menyebarluaskan kesadaran akan harga diri rakyat Indonesia, sehingga membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat dalam pemakaian Bahasa Indonesia (Bahasa Melayu) dan sebutan nasional kongres-kongresnya, juga kegiatannya yang bersifat politik seperti : menuntut adanya Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintahan sendiri, menuntut adanya wakil-wakil rakyat di semua tingkatan pemerintahan.

Dalam pereode pertama pergerakan nasional, perjuangan Sarikat Islam adalah bersifat Kooperatif, loyal kepada pemerintah dan bersifat parlementer. Sifat-sifat tersebut dipergunakan, karena adanya keramahan politik Etis dan sikap simpati pemerintah terhadap organisasi Sarikat Islam. Usaha persuasif Sarikat Islam dengan program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, menimbulkan kepercayaan dan simpati pemerintah terhadap Sarikat Islam, karena kegiatannya dipandang bisa membantu meringankan beban pemerintah dalam memperbaiki taraf kehidupan rakyat, seperti simpati Idenburg terhadap cita-cita ekonomi dan sosial organisasi tersebut, dan disadarinya sebagai proses terbentuknya kesadaran rakyat. Di-

¹⁶⁰ Margono, Ichtisar, op. cit., p. 31.

samping itu pemerintah juga menghargai sikap organisasi tersebut yang tidak menentang pemerintah Hindia Belanda.¹⁶¹ Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Idenburg; di dalam suratnya yang dikirim kepada Menteri Jajahan Negeri Belanda, antara lain menyebutkan bahwa, Ia tidak ada alasan untuk mencurigai Sarikat Islam secara resmi, lakunya baik, segala yang diucapkannya berdasarkan kesetiaan dan mengembangkannya tidak bercorak revolusioner.¹⁶² Sedangkan kepercayaan Sarikat Islam terhadap pemerintah, karena dilihatnya bahwa pemerintah mulai banyak memperhatikan rakyat; dengan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan dan kemunduran akibat penjajahan. Sikap simpati dan iklim politik yang diciptakan oleh pemerintah, juga memberikan harapan yang baik, bahwa pemerintah akan lebih meningkatkan usaha-usahanya dalam membina dan mengembangkan kemajuan bagi rakyat Indonesia, seperti bantuan pemerintah di dalam mengatasi kesulitan Sarikat Islam yang ditimbulkan oleh para pamongpraja di dalam pengembangan Sarikat Islam lokal. Sikap pemerintah tersebut melahirkan kerjasama Tjokroaminoto dan Rinkes untuk mengadakan perjalanan keliling dalam penyelenggaraan rapat-rapat pembentukan Sarikat Islam lokal, dan Rinkes bertugas menyelesaikan persoalan dengan pamongpraja daerah yang bersangkutan.¹⁶³ Di samping itu yang memberikan kesan baik yang dalam kepada para pemimpin Sarikat Islam, adalah sikap sederhana dari Idenburg yang tidak menghendaki cara penghormatan kolot sesuai kebiasaan tradisi Jawa; yaitu ketika berlangsungnya audensi dengan pengurus Sarikat Islam pada th. 1913.¹⁶⁴ Oleh karena itu, kesetiaan dan kemauan Sarikat Islam untuk bekerjasama dengan pemerintah terasa lebih besar.

Sifat-sifat Sarikat Islam tersebut, sebagaimana terlihat dalam banyak hal, antara lain : kongres-kongres

¹⁶²Margono, op. cit., p. 30.

¹⁶³A.P.E. Korwer, op. cit., p. 33.

¹⁶⁴Ibid., p. 64.

Sarikat Islam senantiasa memperdengarkan Wilhelmus, mengibarkan bendera Belanda, juga para pembicara dalam kongres tersebut tidak pernah alpa menyampaikan penghormatan kepada Sri Baginda Ratu dan pemerintah Hindia Belanda. Para pemimpin Sarikat Islam juga selalu mengemukakan dalam pidatonya, bahwa Undang-undang dan pemerintah haruslah dipatuhi serta menekankan keinginannya untuk bekerjasama dengan pemerintah.¹⁶⁵ Hal itu menunjukkan bahwa para pemimpin Sarikat Islam adalah begitu percaya kepada Gubernur Jenderal, sehingga di dalam kongresnya menyerankan untuk menghapuskan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah,¹⁶⁶ sebagaimana dikemukakan oleh Tjokroaminoto :

Kita tjinta Pemerintah jang melindungi kita. Karena itu, kita tidak takut untuk meminta perhatian atas segala sesuatu jang kita anggap baik, dan menuntut apa sadja, jang dapat memperbaiki bangsa kita, tanah air kita dan pemerintah kita, ... Kita sama sekali tidak berteriak-teriak "Persetan Pemerintah", Kita malah berseru : "Dengan Pemerintah, bersama dengan Pemerintah dan untuk membantu Pemerintah menudju kearah jang benar".¹⁶⁷

Sifat-sifat perjuangan Sarikat Islam tersebut, tidak dapat dipertahankan dengan masuknya cita-cita revolusioner dan sosialis dalam perjuangannya. Perjuangannya mulai bersifat radikal dan lebih berani menentang pemerintah dan badan-badannya; meskipun masih tetap menyetujui aksi parlementer dan evolusioner. Hal itu seperti terlihat dalam pembahasan-pembahasan dalam kongresnya yang menuntut perubahan secara radikal dalam konstelasi sosial di Indonesia, ikut campur-tangan dalam pemogokan, Sarikat Islam juga menggabungkan diri dalam Radicale Concentratie.

Berubahnya sifat perjuangan Sarikat Islam serta adanya beberapa peristiwa kerusuhan; yang terjadinya di-

¹⁶⁵Ibid., p. 63.

¹⁶⁶Deliar Noer, op. cit., p. 125.

¹⁶⁷Mohammad Roem, op. cit., pp. 14, 16.

hubungkan dengan kegiatan propaganda Sarikat Islam, seperti di Toli-toli Sulawesi Tengah dan di Cimareme Garut, menyebabkan pemerintah mengadakan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan Sarikat Islam, membatasi geraknya dan mengadakan tindakan keras terhadap para pemimpin Sarikat Islam. Tindakan pemerintah tersebut, sebagaimana terlihat adanya larangan kepada Abdul Moeis untuk mengunjungi semua daerah di luar Jawa dan Madura,¹⁶⁸ Juga dikemukakan oleh pemerintah akan perlunya pembatasan kemerdekaan berkumpul dan bersidang, yang merupakan kemunduran dari "Janji November"; tentang adanya kemungkinan penyerahan sebagian kekuasaan dari pemerintah kepada Dewan Rakyat dan Dewan-dewan setempat. Di samping itu pemerintah juga melaksanakan penangkapan terhadap para pemimpin Sarikat Islam yang dituduh terlibat dalam peristiwa di Garut, seperti terhadap Sosrokardono; Sekretaris Central Sarikat Islam yang dituduh berpartisipasi dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan untuk melakukan kejahatan, yang kemudian diadili dan dihukum 4 tahun penjara mulai Nopember 1920. Begitu pula terhadap Tjokroaminoto yang ditahan dengan tuduhan memberikan keterangan palsu pada pengadilan Sosrokardono dan setelah beberapa bulan ditahan serta dapat dibuktikan bahwa tidak bersalah, ia dilepaskan dari tahanan pada 5 April 1922.¹⁶⁹

Tindakan keras pemerintah terhadap Sarikat Islam tersebut; khususnya penahanan Tjokroaminoto yang tidak terbukti kesalahannya serta harapan Sarikat Islam kepada pemerintah untuk membersihkan nama pemimpinnya tersebut dari segala tuduhan tentang keterlibatannya dalam Sarikat Islam Afdeling B,¹⁷⁰ yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, demikian pula harapan dan tuntutananya kepada pe-

¹⁶⁸Deliar Noer, op. cit., p. 149.

¹⁶⁹Ibid., p. 218.

¹⁷⁰Sarikat Islam Afdeling B merupakan suatu organisasi yang tertutup dan mungkin dapat juga dikatakan sebagai organisasi bawah tanah yang secara resmi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sarikat Islam. Ibid., p. 149.

merintah; untuk memperbaiki kondisi sosial politik di Indonesia, yang sedikit sekali diwujudkan bahkan di bidang politik mengalami kemunduran; dengan rencana diundangkannya Indische Staatsregeling yang merupakan selubung baru dari Regeerings Reglement,¹⁷¹ menjadikan Sarikat Islam tidak dapat lagi mempercayai fihak pemerintah, sehingga di dalam kongresnya th. 1923 dibicarakan kemungkinan ia mengundurkan diri dari partisipasinya dalam Volksraad dan akan melaksanakan perjuangan yang bersifat non kooperatif atau di kalangan Sarikat Islam dikenal dengan sikap Hijrah. Dengan munculnya sikap ini, mengantarkan Sarikat Islam memasuki pereode perjuangannya yang bersifat non Kooperatif, yang secara teguh tetap dilaksanakan dan dipertahankan sampai akhir masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia.

Sarikat Islam dengan kongresnya pada th. 1924 di Surabaya, memutuskan bahwa ia tidak akan mempunyai seorang wakilpun dalam Volksraad. Juga melarang para anggotanya untuk melakukan hubungan langsung dengan dewan, kecuali melalui anggota oposisi dalam Volksraad. Kepada anggotanya yang tetap mempertahankan untuk duduk di Volksraad diminta meninggalkan Sarikat Islam.¹⁷² Sifat perjuangannya itu disebut Hijrah, yaitu menolak bekerjasama dengan pemerintah, dan berusaha untuk bekerjasama menyusun kemampuan sendiri, membulatkan suara dan mempersatukan usaha di kalangan sendiri di bidang pergaulan hidup.¹⁷³ Sarikat Islam juga berpendapat bahwa tidak ada gunanya untuk mengajukan mosi apapun kepada pemerintah, karena terbukti selama ini bahwa pemerintah sedikit sekali memperhatikannya dan yakin bahwa pemerintah tidak akan melaksanakannya. Perjuangan yang demikian ini juga diperluas sampai ke Dewan-dewan Daerah; termasuk Dewan-dewan Desa.

¹⁷¹ Ibid., p. 221.

¹⁷² Ibid., p. 150 dan Susanto Tirtoprodjo, op. cit., p. 38.

¹⁷³ Deliar Noer, op. cit., p. 160.

Sikap Hijrah yang tetap dipertahankan hingga berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa Sarikat Islam pada th. 1931 menekankan kembali perlunya hijrah dalam ekonomi dan politik; sehubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam masa krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan.¹⁷⁴ Begitu pula pada saat dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah yang lebih ketat, untuk menekan kegiatan partai politik yang bersifat non kooperatif menjadi kooperatif. Untuk itu Sarikat Islam tetap mempertahankan sikap hijrah perjuangannya, sehingga menimbulkan perpecahan di tubuh Sarikat Islam; dengan berdirinya PSII Penyedar.¹⁷⁵ Sarikat Islam juga menentang usaha kerjasama terakhir antara rakyat Indonesia dengan pemerintah kolonial Belanda, sesuai dengan isi Maklumat Bersama¹⁷⁶ antara Gabungan Politik Indonesia dan Majelis Rakyat Indonesia, sehubungan dengan pecahnya Perang Pasifik. Maklumat itu menganjurkan rakyat Indonesia agar memberi bantuan penuh kepada pemerintah dalam mempertahankan ketertiban dan keamanan umum, rakyat agar dengan sungguh-sungguh menurut segala perintah dan petunjuk pemerintah Belanda. Dikeluarkannya maklumat yang begitu penting; akan mempunyai akibat-akibat yang jauh bagi rakyat dan tanah air, tanpa melalui proses yang demokratis, oleh Sarikat Islam dipandang melampaui batas wewenang mereka, sehingga Sarikat Islam memprotes tindakan tersebut dan selanjutnya menyatakan keluar dari kedua badan tersebut.

¹⁷⁴Ibid.

¹⁷⁵Ibid., p. 163.

¹⁷⁶Maklumat itu dikeluarkan dalam upaya memperoleh Indonesia Berparlemen, yang juga meminta kepada pemerintah agar segera mengajak Pergerakan Rakyat Indonesia, untuk bersama-sama membentuk susunan masyarakat yang berdasarkan demokrasi politik, ekonomi dan sosial bagi nusa dan bangsa. Ibid., pp. 293, 294 dan A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 151.

C. Beberapa Segi Aktifitas Sarikat Islam dalam Pergerakan Nasional

Kesertaan Sarikat Islam dalam pergerakan nasional di Indonesia, dapat diketahui dari beberapa segi aktifitasnya untuk ikut serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa segi aktifitasnya tersebut dapat digolongkan dalam kategori sebagaiberikut :

1. Aktifitasnya untuk meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia, dalam upaya menumbuhkan dan meratakan kesadaran nasional.
2. Menyuarakan aspirasi rakyat dalam menuntut hak-haknya sebagai suatu bangsa serta partisipasinya di dalam pemerintahan.
3. Membangun persatuan dan kekuatan nasional, dalam upayanya mempertahankan semangat dan kesatuan usaha di dalam perjuangan pergerakan nasional.

Dalam upaya melaksanakan perjuangan pergerakan nasional yang didukung oleh segenap rakyat Indonesia, maka Sarikat Islam berusaha membangun kembali dan memeratakan kesadaran akan harga diri rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan, karena akan dapat menumbuhkan kesadaran nasional rakyat Indonesia, yakni suatu hal yang sangat diperlukan dalam perjuangan pergerakan nasional. Dalam upayanya ini, Sarikat Islam ikut serta berusaha meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia, melalui perjuangan-perjuangannya di bidang ekonomi, sosial dan keagamaan,¹⁷⁷ seperti :

1. Membangun kembali semangat berusaha di bidang ekonomi rakyat guna memperbaiki perekonomian rakyat.
2. Meningkatkan status sosial rakyat, dengan menolak segala perbuatan sewenang-wenang terhadap mereka, tidak menghendaki adanya perbedaan-perbedaan yang merendahkan martabat rakyat serta mengusahakan terwujudnya sikap

¹⁷⁷A.P.E. Korver, Sarekat, op. cit., p. 89.

persaudaraan dan kebersamaan di antara rakyat Indonesia.

3. Mengusahakan perbaikan pendidikan serta praktek kehidupan beragama rakyat Indonesia.

Dengan kegiatan tersebut, Sarikat Islam juga bermaksud memperbaiki segi moral rakyat Indonesia, yang karena penjajahan mengalami kemerosotan, seperti : tertanamnya jiwa membudak, merasa rendah diri dan takut membela hak-haknya. Para pemimpin Sarikat Islam menganggap tugasnya yang paling utama, adalah untuk menyadarkan rakyat terhadap hak-haknya yang dilindungi oleh pemerintah, terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.¹⁷⁸ Melalui kegiatan-kegiatannya tersebut, Sarikat Islam menjadi pusat penggemblengan rakyat yang pertama lahir di Indonesia, yang di dalamnya berkumpul anggotanya dari bermacam-macam status sosial, pandangan serta dengan berbagai harapan yang ingin di peroleh melalui Sarikat Islam, mematangkan diri dalam satu kesatuan keanggotaan Sarikat Islam. Anggota-anggota itu berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia dengan agama Islam sebagai ikatan pemersatunya, untuk mewujudkan berbagai kesadaran, utamanya yang mengarah kepada kesadaran berbangsa dan bernegara.¹⁷⁹ Hal itu dapat diketahui pada kongres-kongres Sarikat Islam, yang diikuti oleh wakil-wakil dari seluruh Sarikat Islam lokal dari berbagai daerah di Indonesia, berkumpul dan bersama-sama membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan warganya di semua bidang kehidupan.

Aktifitas Sarikat Islam berikutnya, adalah mengemukakan segala sesuatu yang dirasakan dan diinginkan oleh rakyat dalam upaya memperoleh kembali hak-haknya sebagai suatu bangsa serta keikut-sertaan rakyat di dalam pemerintahan di Indonesia. Kesemuanya itu dihimpun dan dibahas oleh para pemimpin Sarikat Islam, selanjutnya diajukan ke-

¹⁷⁸Ibid., p. 122.

¹⁷⁹Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Mutiara, 1979), pp. 258, 259.

pada pemerintah agar diperhatikan ataupun dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap segala sesuatu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Hal ini dilaksanakan, karena Sarikat Islam begitu percaya terhadap maksud baik pemerintah; sehubungan dengan dilaksanakannya politik Etis, sehingga Sarikat Islam kelihatannya juga mau bekerjasama dengan pemerintah, untuk mengadakan perbaikan kehidupan rakyat.

Sarikat Islam dengan kongres-kongresnya; merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi tersebut dan sejak th. 1916 disebut kongres nasional, berusaha menghimpun berbagai aspirasi dan keinginan rakyat tentang segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya; berupa keluhan maupun harapan. Juga membicarakan bermacam-macam masalah, dari ekonomi sampai politik.¹⁸⁰ Kongres juga dipergunakan sebagai forum untuk mendidik rakyat tentang masalah-masalah tertentu,¹⁸¹ yang dicetuskan dalam bentuk gagasan serta pemikiran para pemimpin Sarikat Islam, di dalam memahami keadaan yang tengah berlangsung di masyarakat, ataupun terhadap keinginan-keinginan masyarakat yang disampaikan kepada mereka.

Di dalam aktifitasnya ini, Sarikat Islam mengajukan berbagai keluhan dan tuntutan kepada pemerintah, yang antara lain :

Pertama, sehubungan dengan adanya rencana kewajiban militer bagi rakyat Indonesia. Sarikat Islam mengemukakan bahwa kemungkinan dilakukannya prestasi-prestasi militer oleh rakyat, haruslah diikuti dengan pemberian imbalan dengan perluasan hak-hak politiknya. Selama hal itu belum dinyatakan, Sarikat Islam hanya mengemukakan bahwa apabila terjadi serangan dari luar negeri, ia tidak akan memberikan bantuan apapun kepada pihak agresor.¹⁸² Di dalam

¹⁸⁰A.P.E. Korver, op. cit., p. 166.

¹⁸¹Dalam kongres tersebut, diadakan rapat terbuka yang dapat dihadiri oleh setiap orang untuk mendengarkan pidato-pidato yang diadakan. Mohammad Roem, Tiga, op.cit., p. 11.

¹⁸²A.P.E. Korver, op. cit., p. 57.

mosinya yang dikeluarkan oleh Pengurus Central Sarikat Islam pada bulan Agustus 1916, menyatakan persetujuannya dengan tujuan Pertahanan Indonesia, dengan mengemukakan keluhan dan tuntutan terhadap pemerintah, yaitu tentang kekecewaan rakyat Indonesia terhadap kesewenang-wenangan dan sikap menekan dari kalangan pamongpraja dan swasta Belanda. Apabila kekecewaan tersebut tidak diatasi, maka jika terjadi serangan dari luar atas Indonesia, mungkin saja akan ternyata bahwa rakyat Indonesia tidak dapat diandalkan. Selanjutnya dikemukakan bahwa penentuan kewajiban milisi dikaitkan dengan tuntutan adanya pemerintahan sendiri. Hak-hak politik yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak sebanding dengan kemungkinan berlakunya kewajiban untuk berperan serta dalam pertahanan Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan kewajiban militer haruslah bersamaan dengan pemberian hak-hak politik lebih banyak, agar rakyat Indonesia menganggap kewajiban milisi sebagai "soal nasional" dan dengan baik menerimanya. Pengaturan pertahanan Indonesia adalah soal yang akan dibicarakan dalam parlemen, untuk itu rakyat Indonesia juga harus terwakili di dalam parlemen tersebut. Akhirnya dikemukakan tentang keadaan ekonomi rakyat Indonesia yang buruk, sehinggakaan dirasa memberatkan bila pajak rakyat dinsikkan untuk memperkuat pertahanan yang direncanakan.¹⁸³ Tuntutan Sarikat Islam tentang perluasan hak-hak politik bagi rakyat Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Tjokroamnoto dalam pidatonya pada kongres Sarikat Islam di Bandung th. 1916 antara lain :

kita berharap dengan sangat agar diadakan peraturan, jang memberi kita penduduk bumiputera hak untuk ikut serta dalam mengadakan bermatjam-matjam peraturan, jang sekarang sedang kita pikirkan. Tidak boleh terdjadi lagi, bahwa dibuat perundang-undangan untuk kita, bahwa kita diperintah tanpa kita, dan tanpa mengikutsertakan kita, ... kita akan terus mengharap-

¹⁸³Ibid., p. 60.

kan dengan ichlas dan djudjur datangnja status berdiri sendiri bagi Hindia Belanda, atau paling sedikit Dewan Djadjahan, agar kita dapat ikut berbitjara dalam urusan pemerintahan... "Pemerintahan sendiri" adalah perlu. Lebih lama lebih dirasakan, bahwa tidak patut lagi Hindia diperintah oleh Nederland, seperti tuan tanah mengurus persil-persilnja, tidak pantas lagi untuk memandang Hindia sebagai sapi perahan, jang hanya mendapat makan karena susunja, tidak pantas lagi untuk memandang negeri ini sebagai tempat untuk didatangi dengan maksud mentjari untung, dan sekarang djuga sudah tidak patut lagi, bahwa penduduknja, terutama puterabuminja, tidak punja hak untuk ikut bitjara dalam urusan pemerintahan, jang mengatur nasibnya.¹⁸⁴

Selanjutnya Sarikat Islam juga menyusun instruksi khusus untuk wakilnya; Abdul Moeis, yang akan menghadap Ratu Belanda untuk menyampaikan masalah pertahanan Indonesia tersebut, dengan mengajukan tuntutan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat; kesehatan, pertanian, kerajinan dan perdagangan, dengan memperluas pendidikan kejuruan serta memajukan peraturan perkreditan dan kumpulan koperasi. Juga mengajukan tuntutan agar memperluas pengaturan irigasi, menegakkan hak-hak buruh dari tekanan yang dilakukan beberapa kepala desa dan ambtenaar Bumiputera serta diadakannya perubahan dalam beberapa ketentuan hukum, khususnya dalam hal sewa tanah.¹⁸⁵

Ke dua, sehubungan dengan berdirinya Dewan Rakyat (Volksraad), maka Sarikat Islam mempergunakannya sebagai forum atau sarana aksi perjuangannya dan dapat bertindak sebagai penasehat bagi Parlemen Belanda serta sebagai "rem" terhadap anggota-anggota parlemen yang konservatif.¹⁸⁶

¹⁸⁴Mohammad Roem, op. cit., pp. 14, 15.

¹⁸⁵Deliar Noer, Gerakan, op. cit., p. 133.

¹⁸⁶Sarikat Islam membuat Volksraad sebagai suatu forum yang memungkinkan untuk mengemukakan tuntutan organisasi; sebagaimana yang dihasilkan oleh kongres-kongresnya. Juga dapat menunjukkan dengan keyakinan dan kenyataan terhadap keadaan rakyat Indonesia yang sebenarnya, serta dapat mengemukakan pandangannya tentang berbagai masalah dan untuk membela hak-hak rakyat. Deliar Noer, op. cit., p. 130.

Sarikat Islam berusaha mendudukkan posisi rakyat yang sebenarnya dalam Volksraad serta fungsinya dalam pemerintahan, sehubungan dengan adanya Dewan Rakyat yang hanya sebagai sandiwara belaka; tidak berfungsi sebagai lembaga legislatif, tetapi hanya mempunyai kekuasaan memberi nasehat atau saran kepada pemerintah. Usaha itu dikemukakan melalui suatu mosinya yang diajukan kepada pemerintah kolonial Belanda, pada tanggal 18 Mei 1918,¹⁸⁷ yang didukung sepenuhnya oleh segenap golongan di kalangan pergerakan. Mosi itu dikenal dengan sebutan Mosi Tjokroaminoto yang mengemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Bahwa hak pilih adalah sepenuhnya harus diakui di tangan rakyat.
2. Bahwa badan perwakilan (Dewan Rakyat) adalah mempunyai hak legislatif penuh.
3. Bahwa parlemen mempunyai kekuasaan tertinggi, oleh karena itu pemerintah harus bertanggung jawab kepadanya.

Untuk memperkuat usahanya tersebut, dengan dibentuknya Radicale Concentratie pada bulan Nopember 1918 dan Sarikat Islam juga tergabung di dalamnya, maka melalui badan tersebut ia menuntut pemerintah kolonial Belanda supaya merubah Volksraad menjadi Parlemen, sehingga sifat "adviserend" dari badan itu berubah menjadi sifat "legislatif". Dituntut pula di dalam parlemen tersebut tidak hanya terdiri dari wakil-wakil organisasi politik saja yang mewakili rakyat, tetapi juga dari golongan-golongan istimewa yang belum tergabung dalam organisasi politik, yakni dari wakil-wakil golongan yang sekarang disebut sebagai golongan fungsional.¹⁸⁸ Usaha Sarikat Islam lainnya untuk mempercepat realisasi badan perwakilan yang sesungguhnya; parlemen yang bersifat legislatif, adalah memprakarsai

¹⁸⁷Masyhur Amin, Saham, op. cit., p. 32.

¹⁸⁸Susanto Tirtoprodjo, Sejarah Pergerakan, op.cit., p. 32.

pendirian lembaga konsentrasi yang berada di luar Volksraad, yang diberi nama Democratische Concentratie.¹⁸⁹ Lembaga ini menuntut supaya dapat berpartisipasi dalam komisi Alting; dinamakan demikian karena ketuanya bernama J.H. Carpentier Alting, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun suatu rencana bagi sistim perwakilan di Indonesia.

Ke tiga, sehubungan dengan tuntutan tentang pemerintahan sendiri sertaperluasan hak-hak Volksraad yang mengarah pada terwujudnya badan legislatif, Sarikat Islam menuntut berdirinya Dewan-dewan Daerah dan Dewan-dewan Desa. Perlu dibentuknya Dewan-dewan tersebut, dengan tujuan untuk mentransformasikannya menjadi suatu lembaga perwakilan yang sesungguhnya untuk keperluan legislatif.¹⁹⁰ Dikemukakan bahwa hak pilih untuk keperluan Dewan Desa, haruslah diberikan kepada orang dewasa yang telah berumur 18 tahun ke atas. Untuk dewan lainnya, hak pilih haruslah diberikan kepada orang dewasa yang telah berumur 21 tahun ke atas, yang dapat membaca dan menulis dalam bahasa apapun, serta mengerti secukupnya Bahasa Melayu. Dalam hal ini Sarikat Islam juga mengemukakan tentang kondisi masyarakat Desa yang masih belum berfungsi dengan baik, terutama dalam hal pemerintahan Desa. Kondisi yang demikian itu disebabkan oleh adanya kekuasaan otoriter serta pendidikan spiritual Kepala Desa yang dangat sedikit.¹⁹¹ Sarikat Islam yang memandang sangat pentingnya arti masyarakat desa bagi perkembangan politik dan kemasyarakatan Indonesia,

¹⁸⁹Ketua lembaga ini, adalah Tjokroaminoto, sedangkan wakil ketua dan sekretarisnya masing-masing adalah Abdul Moeis dan Agus Salim. Tiga orang anggota lainnya ialah wakil dari Budi Utomo dan Pasundan; mereka ini juga menjadi anggota Sarikat Islam. Dua lainnya duduk sebagai wakil organisasi dari Insulinde dan Social Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Deliar Noer, *op. cit.*, p. 137.

¹⁹⁰*Ibid.*, p. 127.

¹⁹¹A.P.E. Korver, *Sarekat, op. cit.*, p. 101.

menuntut adanya peraturan-peraturan guna memperbaiki pemerintahan desa. Tuntutan yang diajukan oleh Sarikat Islam itu, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan "Aktifitas Perjuangan Sarikat Islam" pada bab III. Untuk pembentukan Dewan-dewan Desa ini pada tahun 1919 telah dibahas oleh Dewan Rakyat suatu rancangan ordonansi, namun sampai pada th. 1930 masih belum ada perubahan mengenai pemerintahan desa.¹⁹²

Aktifitas perjuangan Sarikat Islam di dalam membangun persatuan dan kekuatan nasional; sebagai upayanya untuk membangun dan mempertahankan semangat dan kesatuan usaha dalam perjuangan pergerakan nasional, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, Sarikat Islam yang sejak berdirinya adalah berdasarkan organisasinya pada agama Islam, yang merupakan agama mayoritas rakyat Indonesia, berusaha mewujudkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia melalui ikatan kesamaan agama rakyat Indonesia. Hal itu seperti ditegaskan oleh pemimpin Sarikat Islam; Tjokroaminoto, "...memang Sarikat Islam memakai nama agama sebagai ikatan persatuan bangsa, buat mencapai cita-cita sebenarnya, dan agama tidak akan menghambat kita mencapai tujuan itu".¹⁹³ Upaya ini dilaksanakan, karena dilihatnya bahwa pemerintah kolonial Belanda senantiasa mencegah tumbuhnya persatuan rakyat Indonesia; dengan politiknya "divide et impera" (memecah belah dan menguasai), seperti yang dilaksanakan juga terhadap organisasi Sarikat Islam sendiri, yaitu oleh pemerintah tidak diakui badan hukumnya sebagai organisasi yang bersifat menyeluruh, tetapi hanya diakui secara setempat-setempat, meskipun kerjasama antara perkumpulan setempat ini diperkenankan. Kegiatan Sarikat Islam ini dilaksanakan antara lain melalui :

¹⁹²Ibid., p. 102.

¹⁹³Abu Hanifah, Renungan, op. cit., p. 22.

1. Peranan aktif para pemimpin Pusat Sarikat Islam di dalam mendirikan cabang Sarikat Islam di daerah-daerah. Pada rapat-rapat pembentukan tersebut dan kesempatan-kesempatan lain di daerah, mereka senantiasa menekankan pentingnya persatuan yang erat dalam gerakan.¹⁹⁴

2. Penyelenggaraan kongres-kongres tahunan Sarikat Islam, yang sejak tahun 1916 disebut dengan kongres nasional. Hal itu tidak sekedar menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bahwa kongres-kongres itu diikuti oleh utusan-utusan dari sebagian besar wilayah di Indonesia, tetapi juga menunjukkan suatu usaha yang sadar dari para pemimpin Sarikat Islam, untuk menyebarkan dan menegakkan cita-cita nasional, dengan Islam sebagai ajaran yang dianggap dasar dalam pemikiran tersebut.¹⁹⁵ Dengan sebutan nasional itu, juga dimaksudkan bahwa Sarikat Islam menuju ke arah persatuan yang teguh dari semua golongan-golongan bangsa Indonesia yang harus dibawa setinggi tingkat "natie" (bangsa).¹⁹⁶ Ke dua, Sarikat Islam ikut serta dalam mewujudkan dan memperkuat lembaga-lembaga konsentrasi perjuangan pergerakan nasional bersama organisasi pergerakan nasional lainnya; meskipun Sarikat Islam sendiri telah mempunyai anggota yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keikutsertaan Sarikat Islam tersebut, antara lain dapat dilihat dalam :

1. Partisipasinya di dalam Komite Nasional, yang didirikan atas anjuran Budi Utomo sehubungan dengan akan dibentuknya Dewan Rakyat. Komite ini bertujuan membuat daftar nama-nama calon anggota Volksraad, untuk dipilih oleh Majelis Daerah, dan atau diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda.¹⁹⁷ Dalam hal ini Sarikat Islam mengajukan

¹⁹⁴A.P.E. Korver, op. cit., p. 180.

¹⁹⁵Deliar Noer, op. cit., p. 126.

¹⁹⁶A.K. Pringgodigdo, Sejarah, op. cit., p. 6.

¹⁹⁷Ibid., p. 7.

2 calon, yang kedua-duanya berhasil menjadi anggota Volksraad; Tjokroaminoto duduk sebagai anggota yang diangkat oleh pemerintah dan Abdul Moeis sebagai anggota yang dipilih oleh Majelis Daerah.

2. Menggabungkan diri dalam Radicale Concentratie, yang dibentuk sebagai fraksi kiri yang bersifat radikal di dalam Volksraad, bertujuan untuk menuntut adanya parlemen yang sebenarnya serta perluasan hak-hak rakyat.¹⁹⁸ Lembaga ini diperbarui kembali pada th. 1923, sehubungan dengan rencana diundangkannya perubahan Regeerings Reglement oleh Volksraad. Berkedudukan di luar Volksraad; berbeda dengan yang lama berada dalam Volksraad, dan diberi nama "Organisatie van Geheel de Volken Vakbeneging" (Organisasi dari segala gerakan rakyat dan Serikat-serikat sekerja).¹⁹⁹

3. Mendukung usaha pembentukan suatu badan gabungan (federasi) dari organisasi-organisasi pergerakan nasional; dalam upaya mewujudkan persatuan di dalam pergerakan nasional. Keputusan itu dihasilkan dalam kongres Sarikat Islam di Pekalongan bulan September 1927. Untuk ini pemimpin Sarikat Islam (PSI); Dr. Sukiman, bersama dengan pemimpin PNI; Ir. Sukarno, menyusun peraturan sementara untuk badan gabungan tersebut, dan setelah selesai hasilnya dikirimkan kepada para pemimpin organisasi pergerakan, maka pada tanggal 17 Desember 1927 lahirlah Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Sekalipun dalam perkembangan selanjutnya Sarikat Islam mengundurkan diri dari badan tersebut, sehubungan dengan adanya perbedaan-perbedaan dasar dalam badan tersebut, di antara partai-partai anggotanya.²⁰⁰ Sehingga

¹⁹⁸Margono, Ichtisar, op. cit., p. 70.

¹⁹⁹Ibid., p. 73.

²⁰⁰Perbedaan tersebut meliputi dua hal. Pertama, yang berkaitan dengan praktek politik antara partai yang berkoperasi dengan partai yang beronkooperasi. Dalam hal ini Sarikat Islam berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin

menurut Sarikat Islam persatuan dalam PPPKI itu adalah lebih merupakan impian daripada kenyataan, oleh karena itu pada tanggal 28 Desember 1930, Sarikat Islam mengundurkan diri dari badan tersebut.

D. Hasil Perjuangan Sarikat Islam sebagai salah satu Organisasi Pergerakan Nasional

Aktifitas Sarikat Islam dalam pergerakan Nasional, yang dilaksanakan dengan berbagai bentuk dan sifat kegiatannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, mampu menghasilkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Perhatian Sarikat Islam terhadap hal-hal praktis; menyangkut kehidupan rakyat Indonesia, berhasil memberikan kepada rakyat Indonesia perasaan diperhatikan dan dilindungi serta diperjuangkan segala sesuatu yang dikeluarkan dan diinginkan. Adanya perasaan tersebut, menumbuhkan kesadaran rakyat terhadap kondisinya yang serba terbelakang dalam segala segi kehidupan. Hal itu membangkitkan kembali semangat berusahnya di dalam memperbaiki taraf kehidupannya dan secara bertahap berkembang menuju kepada kesadaran nasional. Rakyat yang semula hanya mengetahui berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka; tanpa mengetahui apa yang menjadi hak mereka, maka dengan kegiatan Sarikat Islam tersebut, rakyat menjadi mengetahui terhadap hak-haknya yang mesti diperoleh dari pemerintah.²⁰¹ Rakyat bangkit kembali karena mereka merasa ada yang memperhatikan nasibnya dan merasa diperhitungkan kembali eksistensinya. Sebab Sarikat Islam memberikan rasa kebersamaan dan persaudaraan; suatu hal yang tidak pernah mereka peroleh lagi sejak desa sebagai suatu kesatuan masyarakat

dipersatukan. Ke dua, tentang adanya ketentuan bahwa semua anggota mempunyai suara sama; lepas dari soal jumlah kekuatan anggotanya masing-masing. Hal ini melemahkan posisi Sarikat Islam dalam federasi tersebut, Sarikat Islam menuntut hak suara secara proporsional. Deliar Noer, *op. cit.*, pp. 271, 272,

²⁰¹ Mohammad Hatta, *Permulaan, op. cit.*, p. 13.

adat ditembus oleh pengaruh Barat. Massa rakyat memandang Sarikat Islam sebagai gerakan masyarakat yang akan sanggup membebaskan mereka dari penderitaan. Sebagaimana halnya yang mereka saksikan, bahwa gerakan ini berani bertindak melawan ketidak-adilan, dengan gigih memperjuangkan keinginan rakyat untuk memperoleh perubahan kondisi yang lebih baik dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan serta menampung aspirasi rakyat untuk diajukan kepada pemerintah.²⁰²

Tumbuhnya kesadaran rakyat akan nilai manusia dan harga dirinya tersebut, berakibat pula tumbuhnya semangat berusaha rakyat; yaitu dengan ikut sertanya mereka secara aktif dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan mereka, timbul pula keberanian rakyat untuk mengemukakan keluhan-keluhan tentang segala kekurangan yang terjadi pada dirinya dan di lingkungan sekitarnya. Rakyat juga mampu mengajukan tuntutan-tuntutan perbaikan, baik melalui forum-forum yang diselenggarakan oleh Sarikat Islam ataupun yang disampaikan langsung kepada para pemimpin Sarikat Islam setempat. Kondisi rakyat yang demikian itu diakui dan disadari oleh Idenburg sebagai proses terbentuknya kesadaran rakyat, seperti yang disebutkan dalam sepucuk suratnya kepada Abraham Kuyper :

Si Pribumi mulai menyadari eksistensinya; kepadanya telah dijelaskan bahwa tanahnya yang disewakan untuk budi daya gula jauh di bawah harga: bahwa terlalu sedikit upah kerja yang diterimanya; dia menyadari bahwa keluhan di desa dan di kalangan para kepala bumiputra rendahan tidak dipedulikan. ...bahwa penduduk bumiputra mulai turut bekerja untuk mengurus kepentingannya sendiri dan berjaga-jaga terhadap kesewenang-wenangan.²⁰³

²⁰²W. Poespoprodjo, Jejak-jejak, op. cit., p. 55.

²⁰³A.P.E. Korver, Sarekat, op. cit., p. 28. Dalam sumber lain dikemukakan bahwa ... Orang Bumiputera telah mulai memikirkan nasib peruntungannya dan tentang segala sesuatu yang terjdjadi disekelilingnja. Inilah permulaan "sadar" dari tidurnja. Margono, Ichtisar, op. cit., p.31.

2. Sarikat Islam sebagai organisasi pergerakan nasional pertama yang menghimpun anggota-anggotanya praktis dari seluruh Indonesia, mampu mengembangkan kesadaran rakyat Indonesia terhadap nilai manusia dan harga dirinya menjadi kesadaran nasional yang membuahkan perjuangan rakyat di dalam pergerakan nasional. Kegiatan-kegiatan Sarikat Islam yang secara praktis juga mendapat dukungan rakyat Indonesia, adalah dapat memberikan sumbangan yang tidak kecil artinya bagi penyatuan Indonesia, serta mendorong terbentuknya suatu ikatan berbangsa; yaitu bangsa Indonesia. Hal itu dapat diketahui, bahwa pertentangan budaya dan etnis di kalangan rakyat Indonesia pada awal Abad ini adalah sangat besar, kondisi yang demikian itu senantiasa dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan penjajahannya. Maka dengan macam keanggotaan Sarikat Islam yang meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, adalah merupakan usaha yang sadar dari Sarikat Islam untuk mendobrak pertentangan-pertentangan tersebut, mempersatukannya mereka dalam keanggotaan Sarikat Islam; yaitu melalui ikatan keagamaan mereka. Para pemimpin Sarikat Islam melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengorganisasikan penduduk seluruh Indonesia dalam suatu ikatan dan sampai tingkat tertentu mereka berhasil dalam usahanya itu.²⁰⁴ Demikian halnya dengan kongres Sarikat Islam adalah merupakan kesempatan pertama dalam sejarah Indonesia, yang memungkinkan manusia Indonesia dari berbagai bagian kepulauan Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan politik dan bertukar pikiran tentang berbagai permasalahan. Hal itu makin memperkuat tumbuhnya ikatan persatuan rakyat Indonesia dalam satu jalinan kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Sarikat Islam dengan kongres-kongres tahunannya tersebut, juga dapat memainkan peranan "pra Parlemen" bagi rakyat Indonesia dalam waktu sekian

²⁰⁴A.P.E. Korver, op. cit., p. 182.

lama sebelum terbentuknya suatu perwakilan rakyat yang sejati di Indonesia.²⁰⁵ Central Sarikat Islam sebagai badan pusat dari cabang-cabang Sarikat Islam, telah dapat membantu menyalurkan keluh kesah rakyat yang selama ini tidak dipedulikan oleh kalangan pejabat setempat. Sebab rakyat merasa bahwa seringkali pengaduan yang sungguh layak tidak dipedulikan oleh kalangan pejabat setempat dan menganggap Sarikat Islam pusatlah yang telah membangunkan rakyat di mana-mana dan masih terus juga lebih membangunkannya. Karena itulah kongres-kongres nasional Sarikat Islam juga merupakan semacam pra parlemen, yang seolah-olah membicarakan kepentingan-kepentingan seluruh rakyat Hindia Belanda.²⁰⁶ Betapa Sarikat Islam telah banyak membangunkan pemikiran-pemikiran dan meletakkan landasan ataupun dasar bagi perjuangan rakyat dalam pergerakan nasional di Indonesia. Hazeu mengemukakan penilaiannya sebagai berikut :

Tidak pernah terbukti dengan jelas melainkan di kongres ini bahwa berkenaan dengan tjara bagaimana Hindia diperintah, ... Rakyat sekarang menuntut agar ikut serta mengatur urusan negaranya. Bahwa bumiputera tidak lagi seperti seperempat atau setengah manusia, melainkan menuntut agar dipandang dan diperlakukan sebagai warga-negara jang merdeka dan penuh.²⁰⁷

3. Meskipun Sarikat Islam dengan kegiatannya menghimpun dan menyalurkan aspirasi rakyat, melalui tuntutan-tuntutannya atau mosi-mosinya kepada pemerintah adalah tidak banyak membawa perubahan yang berarti, seperti yang dikehendaki rakyat, akan tetapi dengan kegiatan Sarikat Islam tersebut, antara lain dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, menjadikan pemerintah dapat mendengarkan dan mengetahui tentang segala sesuatu yang menjadi keinginan rakyat yang sebenarnya. Dalam hal ini pihak pemerintah

²⁰⁵Ibid., p. 270.

²⁰⁶Ibid., p. 126.

²⁰⁷Mohammad Roem, op. cit., p. 18.

kolonial terhadap apa yang dikeluhkan oleh rakyat dan diinginkan perubahannya, adalah membenarkan seperti apa yang dikemukakan oleh pemimpin Sarikat Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang anggota Dewan Hindia Belanda, F.A. Lieftinck dalam laporan hasil penelitiannya tentang sebab musabab perasaan tidak senang rakyat Sumatera Barat dan Selatan, Yaitu yang sampai pada kesimpulan bahwa dalam banyak hal membenarkan apa yang dikemukakan oleh pemimpin Sarikat Islam.²⁰⁸

Ke dua, mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa perbaikan terhadap kondisi yang dikeluh-kesahkan oleh rakyat seperti halnya yang dituntut oleh Sarikat Islam, meskipun di banyak bidang pemerintah tidak mampu melaksanakan atau kadang-kadang memang tidak bermaksud melakukan perbaikan seperti yang dituntut oleh Sarikat Islam. Hal itu disebabkan oleh ketergantungan pemerintah terhadap mentalitas dan sikap pejabat pamongpraja yang tidak memiliki pikiran cerah seperti pemerintah etis Idenburg dan Van Limburg Stirum. Juga ketergantungan pemerintah kolonial Belanda pada pemerintahan di negeri Belanda serta ketidakmampuannya untuk membatasi seluruh kehidupan perusahaan Eropa di Indonesia.²⁰⁹

Beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda, antara lain ialah :

1. Adanya perubahan tindakan oleh kalangan luas pejabat pemerintah, ialah menjadi jauh lebih baik, lunak dan berhati-hati dari keadaan sebelumnya serta tidak lagi sewenang-wenang dan seenaknya saja memperlakukan rakyat. Hal itu seperti adanya instruksi di lingkungan pabrik gula, untuk mencegah tindakan mudah mengeluarkan pemecatan, melarang dilakukannya pemukulan terhadap para buruh dan terhadap keluhan yang layak hendaknya diperhatikan.²¹⁰

²⁰⁸ A.P.E. Korver, op. cit., p. 126.

²⁰⁹ Ibid., p. 127.

²¹⁰ Ibid., p. 128.

2. Pemerintah mulai memberikan hak-hak politik kepada rakyat Indonesia dengan mengikut sertakannya di dalam urusan pemerintahan, meskipun sangat terbatas sekali. Seperti diikuti sertakannya rakyat dalam lembaga Dewan-dewan pemerintahan, baik dalam Dewan Rakyat maupun dalam Dewan-dewan Daerah. Dicabutnya larangan terhadap "perkumpulan ketatanegaraan", yaitu dengan diakuinya hak penduduk untuk berkumpul dan berapat yang pelaksanaannya diatur dan dibatasi demi kepentingan umum dengan peraturan umum.²¹¹ Juga dikeluarkannya janji pemerintah kolonial Belanda kepada Dewan Rakyat pada bulan Nopember 1918 untuk mengadakan perubahan-perubahan luas dalam bidang sosial dan konstitusi; dikenal dengan sebutan "Janji November".²¹² Ke tiga, banyaknya tuntutan atau mosi Sarikat Islam yang tidak direalisasikan oleh pemerintah kolonial Belanda, khususnya di bidang pemerintahan; seperti Volksraad yang tetap dipertahankan fungsinya sebagai badan penasehat. Pemerintah juga melakukan pelanggaran ketatanegaraan seperti tidak menepati "Janji November", hal ini menjadikan rakyat Indonesia tahun demi tahun semakin bertambah kecewa dan sakit hati. Pengalaman-pengalaman di atas makin menambah kesadaran rakyat Indonesia terhadap situasi hubungan kolonial yang ada di Indonesia; yaitu difahaminya tentang adanya pertentangan antara pemerintah kolonial Belanda sebagai pihak penjajah dengan rakyat Indonesia sebagai pihak yang dijajah. Juga benturan kemauan di antara penjajah yang berusaha untuk melanjutkan kekuasaannya di Indonesia, dengan yang dijajah yang berusaha untuk mencapai kemerdekaannya. Untuk mencapai kemerdekaan, tidak mungkin pihak penjajah mau membantu pihak yang dijajah dalam usahanya itu.²¹³ Dengan difahaminya kondisi yang demikian

²¹¹Ibid., p. 30.

²¹²Deliar Noer, Gerakan, op. cit., p. 210.

²¹³Margono, Ichtisar, op. cit., pp. 90, 91.

itu oleh rakyat, adalah makin memperbesar semangat mereka di dalam perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan. Sebagaimana terlihat dengan dilaksanakannya kegiatan yang radikal oleh kaum pergerakan, bersikap non kooperasi dan usaha-usaha memperbesar kekuatan nasional, baik melalui usaha mempererat persatuan dan kesatuan nasional, maupun melalui usaha memperkuat ekonomi dan status sosial rakyat Indonesia.

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Sarikat Islam di dalam pergerakan nasional di Indonesia, telah banyak melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan segala segi kehidupan rakyat Indonesia yang mengalami kemunduran bahkan kerusakan akibat penjajahan Belanda di Indonesia, menuju tercapainya cita-cita nasional Kemerdekaan Indonesia. Hasil perjuangannya meskipun secara fisik dan material tidak banyak, namun dalam segi moral telah dapat memberikan sumbangan yang tidak kecil artinya dalam melahirkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang meliputi seluruh rakyat Indonesia serta bagi penyatuan Indonesia. Hal itu merupakan modal dasar bagi kelanjutan perjuangan bangsa, sehingga dapat dicapai Indonesia Merdeka.